

**PARTISIPASI MASYARAKAT PAPUA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  
(suatu studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua)<sup>1</sup>**

**Oleh : Feri F. Fonataba<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Secara harafiah kita bisa memahami partisipasi sebagai keikutsertaan dalam konteks politik seperti keikutsertaan warga dalam proses politik. Salah satu bagian yang bisa kita ambil dalam ruang partisipasi yaitu pemilihan umum.*

*Sebab pada dasarnya dengan pengamatan sebelumnya penulis melihat bahwa di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura Provinsi Papua sangat apatis terhadap kegiatan partisipasi politik karena dengan berbagai alasan tertentu yang mereka ungkapkan.*

*Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, untuk mencoba mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Distrik Jayapura Selatan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Adapun teori-teori pendukung yang digunakan yaitu Fred I. Greenstein (1968) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek politik oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan observasi. teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan memakai teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan keadaan subjek dan objek.*

*Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat papua pada pemilu presiden 2014 di bandingkan pada pemilu presiden pada tahun 2009. Pada pemilu sebelumnya tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat kota Jayapura distrik Jayapura Selatan mencapai 40.99 persen, dari hasil ini sempat mengalami penurunan yang agak tajam, Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 lalu tingkat partisipasi masyarakat kota Jayapura mencapai 49 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.*

**Kata Kunci : partisipasi politik, masyarakat, pemilihan presiden**

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan demokrasi. Demokrasi menuntun negara sebagai organisasi untuk sekiranya dapat berjalan dengan stabil. Hal ini dikarenakan demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan ideal yang menjauhkan dari kekuasaan yang absolut terfokus pada tirani kekuasaan, sehingga condong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Secara global Demokrasi telah menjadi bagian yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan negara. Pada 1999 Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar didunia (Harris, 2005 hal 89-91.), jika distabilkan dan dikembangkan, hal ini akan merupakan sebuah kemenangan yang bersejarah, bahkan nilai pentingnya akan melalui batas negara itu sendiri. Pelembagaan demokrasi di Indonesia terus dilakukan oleh semua pihak. Hingga saat ini di Indonesia mulai disibukan dengan memperkenalkan alat demokrasi, untuk menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Bahkan demokrasi yang diharapkan bukan hanya sekedar demokrasi prosedural akan tetapi demokrasi yang substansial atau yang betul-betul demokrasi itu tercermin dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Salah satu aspek yang bisa dilihat dalam proses berlangsungnya demokrasi dalam suatu negara yaitu dengan adanya partisipasi, secara khusus dalam konteks pemilihan pemimpin negara dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah salah satu aspek atau pilar dari demokrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh ( Joseph Shcumpeter Harper, 1947 ) bahwa penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi.

dalam (Mas'oed, 2003, hal 57-58). Partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan demokrasi suatu Negara. Sebab pada dasarnya konsep dasar dari demokrasi tentang dari, oleh dan untuk rakyat, salah satu bagiannya yaitu dari rakyat adalah merupakan gambaran bagaimana proses pelibatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan politik termasuk di dalamnya memilih dan menunjuk pemimpin-pemimpin Negara seperti anggota perwakilan dan serta eksekutif dalam suatu Negara. Ruang yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan salah satu pilar demokrasi harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ada dalam proses politik. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dari negara. Sehingga partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawatahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi sangatlah penting karena konsep demokrasi sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi oleh karena itu tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga.

Asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi

kehidupan negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses politik dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik seperti yang diuraikan pada sebelumnya adalah hal yang sangat menonjol bagi negara demokrasi. Secara harafiah kita bisa memahami partisipasi sebagai keikutsertaan dalam konteks politik seperti keikutsertaan warga dalam proses politik. Salah satu bagian yang bisa kita ambil dalam ruang partisipasi yaitu pemilihan umum. Pemilu adalah sarana politik yang diciptakan sebagai ruang untuk warga negara dalam berpartisipasi untuk memilih pemimpin. Pemilu dalam konteks Negara Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali baik pemilihan lembaga legislatif maupun eksekutif termasuk pemilihan presiden.

Seperti yang disampaikan di atas, partisipasi politik yang akan dilihat yaitu partisipasi politik masyarakat yang ada di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dimana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap

sebagai momentum babak baru dalam menentukan pemimpin masyarakat Indonesia yang juga masyarakat setempat yang adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab pada dasarnya dengan pengamatan sebelumnya penulis melihat bahwa di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura Provinsi Papua sangat apatis terhadap kegiatan partisipasi politik karena dengan berbagai alasan tertentu yang mereka ungkapkan. Sehingga penulis juga ingin melihat kembali tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan dalam kegiatan politik khususnya pada momentum pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Konsep Partisipasi Politik**

#### **1. Definisi Partisipasi Politik**

Menurut Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh ( Dalam Damsar 2010:180), memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan”.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam Negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negaranya maka semakin baik pula, dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk ikut berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi, hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik mandat peduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, karena masyarakatnya tidak peduli pada negaranya dan cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi

serta kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dan pengertian partisipasi politik menurut Kuskrido Ambardi (2009:288-290):

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figure para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal atau berhasil.
5. Kegiatan yang dilaksanakan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

## 2. Tipologi Partisipasi

Menurut Kuskrido Ambardi (2009:288-290), Secara umum tipologi dari partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan.

## B. Konsep Pemilihan Umum

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan

(*representative government*). Pemilihan umum disebut juga dengan '*political market*' artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik.

Pemilihan Umum Presiden atau Wakil Presiden, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1995.

Asas pemilu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Langsung  
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum  
Artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminatif.
3. Bebas  
Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia  
Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur  
Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Adil  
Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dari partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam beberapa konsep yang diuraikan di atas, untuk dapat mengarahkan dalam penelitian ini dengan melihat dari partisipasi

masyarakat yang ada dalam konteks pemilihan umum yang di fokuskan pada pemilihan presiden.

### **C. Sistem Pemilu di Indonesia.**

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistim pemilihan umum. Akan tetapi umumnya berkisar dua prinsip pokok yaitu:

- a. Single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil: biasanya disebut sistim Distrik)  
Sistim ini merupakan sistem pemilihan dimana suatu daerah pemilihan memiliki satu wakil. Disini wilayah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil takyat dalam DPR ditentukan dalam jumlah distrik . Calon yang dianggap menang adalah calon dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Oleh karena itu selisih kekalahannya kecil. Jadi tidak ada sistim menghitung suara lebih dalam sistim pemilu distrik.
- b. Multimember constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan propotional representation atau sistim perwakilan berimbang. (Budiarjo, 1983:76-77)

### **D. Sosialisasi Politik.**

#### **1. Pengertian Sosialisasi Politik**

Beberapa pakar politik memberikan definisi atau pengertian tentang sosialisasi politik, sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan. David Easton dan Jack Dannis (1969) memberi suatu batasan tentang sosialisasi politik, yaitu “ Suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingka laku”.

Sementara itu menurut Fred I. Greenstein (1968) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek politik oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Menurut R.S. Sigel dalam Soemarno (2004) mengatapkan bahwa sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma-norma politik yang dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistim politik yang sedang berlangsung.

David E. Apter dalam Soemarno (2004) mengatakan ada tiga tahapan dalam proses politk, yaitu: *tahap pertama*, proses belajar dalam lingkungan keluarga. *Tahap kedua*: adalah bagaimana orientasi politik digeneralisasikan oleh anak ketika dewasa dan anak mulai menghadapi situasi kelompok diluar keluarga. *Tahap ketiga*, berada pada tingkat dewasa, pada tahap ini anak sudah mengenal pilihan mengenai kebutuhan bersosiasi, atau berafiliasi

dengan kelompok yang sesuai dengan pilihannya. Pada tingkat ini muncul sifat ingin mengaktualisasikan diri dengan cara melibatkan diri terhadap pola-pola keyakinan yang pernah diterima dan diyakini sebelumnya melalui organisasi politik. Jadi sosialisasi politik merupakan proses pembentukan kesadaran yang sangat mendalam yang menembus sentra nilai kemanusiaan yaitu nurani manusia.

## **2. Pendidikan Politik**

Dalam Konsep pendidikan politik tampak bahwa pembentukan suatu sikap atau perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara mendadak atau sekaligus, akan tetapi dilakukan melalui suatu proses yang relatif lama yaitu proses pendidikan (*educational process*). Pendidikan mengaktifkan unsur-unsur dinamis dalam artian tidak hanya membentuk dan mengubah sikap dan perilaku, tetapi juga menanamkan tata nilai dan membentuk pola pikir sistematis dan argumentatif didalam memandang problem yang dihadapi.

## **3. Tujuan Sosialisasi Politik**

Menurut Soemarno AP (2004) tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

### **a. Dimensi Psikologis**

Sosialisasi politik terarah kepada sikap pembentuk politik. Perilaku politik dan kepribadian politik yang secara utuh merupakan faktor-faktor kejiwaan. Proses ini berlangsung bertahap, berawal dari tingkat pemahaman atau pengenalan tentang politik (*political cognition*). Kemudian meningkat kepada pendalaman akan makna politik yang memberi dampak terhadap cara berpikir.

### **b. Dimensi Idiologis**

Dimensi ini sebagai proses penerimaan terhadap ideologi sebagai pola keyakinan. Pada dimensi ini ideologi telah menjadi nilai-nilai yang mempedomani sikap dan perilaku kehidupan bernegara, sehingga pengaruh-pengaruh kontemporer tidak lagi memberi makna yang berarti.

### **c. Dimensi normatif**

Tahap ini menunjukkan kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola pikir kedalam sistem norma yang berlaku. Norma menunjuk pada kaidah-kaidah yang dibentuk penguasa dan yang berkembang dalam masyarakat.

## **4. Hakekat Partisipasi Politik**

Sosialisasi politik sebagai “*das sollen*” suatu bangsa atau masyarakat yang ingin mempertahankan sistem nilai yang sedang berlangsung dan mengestafetkan kegenerasi berikutnya.

Secara filsafat sosialisasi politik adalah hakekat manusia yang ingin mengembangkan nilai-nilai pribadi dan pola keyakinan didalam lingkup

suatu sistim. Pembentukan sikap politik dan kepribadian politik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lingkungan tempat keberadaan individu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam symbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya (Nawawi, 1994:104-106). Menurut Dabbs analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjerniaan dan penempatan data pada konteks masing-masing, dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata daripada angka-angka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan observasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Jayapura Selatan.**

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Baik bagi mereka yang sudah termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun bagi mereka yang belum termasuk dalam daftar pemilih tetap atau mereka yang belum mencapai usia tujuh belas tahun. Karena mereka yang belum wajib untuk memilih juga menyaksikan akan pemilihan umum yang diadakan sekali dalam setiap lima tahun, dan mereka juga sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi warga negara sebagai pemilih dan juga dapat dipilih untuk menjadi pejabat pemerintah dimasa yang akan datang.

Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Distrik Jayapura Selatan sangat menarik untuk dibahas kira-kira seberapa jauh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Karena pemilihan dan wakil presiden menjadi indikator kesuksesan demokratisasi di suatu negara. Dalam penulisan ini pilpres dan wapres dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan terus berlangsung, walaupun dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.

Format demokratisasi negeri ini tertuang dalam berbagai peristiwa pilpres dan wapres yang sudah berlangsung sejak tahun 2004. Walaupun sebagian masyarakatnya masih merasa skeptis dan menimbulkan sikap apatis akan tahan demokrasi bangsa ini terutama tentang partisipasi politik, materi dan infrastruktur yang mendukung demokratisasi dianggap belum siap dan belum maksimal. Tetapi bagaimanapun pemilihan secara langsung itu dilaksanakan, hal ini akan menjadi barometer untuk dilihat keberhasilan dan kesuksesan demokrasi dikancah perpolitikan negara kita.

Memahami tentang pemilihan langsung pada pilpres maka seharusnya adalah bagaimana bangsa ini kedepannya lebih meningkatkan upaya penguatan partisipasi dan kedewasaan masyarakat melalui proses yang demokratis. Mengingat karakter dan kemampuan rakyat masih sangat rendah, sementara dalam tataran lapangan dan pelaksanaannya, rakyat hidup dalam ruang sangat terbuka akan informasi. Masalah mendasar tentang tingkat partisipasi dalam proses demokrasi yang terbuka ini runtuhnya era rezim orde baru, adalah awal kebebasan partisipasi yang luar biasa. Masalah yang sebenarnya sangat berbanding dengan kondisi masyarakat yang belum diiringi dengan sikap dan mental yang pasti dalam berdemokrasi.

Modal utama yang harus diusung dalam kerangka demokrasi yang akan turut mengusung terbukanya ruang-ruang politik adalah kebebasan politik yang harus didukung oleh pemikiran yang rasional, daya kritis dan kemandirian bersikap ditengah masyarakat. Kebebasan yang tidak didasari oleh sebuah pemikiran kritis dan rasionalitas politik, pada akhirnya akan menjadikan masyarakat hanya sebagai alat penguatan kekuasaan para elite politik di negara ini. Upaya penguatan dan perebutan kekuasaan semata-mata pada aras politik lokal akan menundang konflik politik perebutan kekuasaan dan akan terus meingkat seiring dilaksanakannya mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pada sebuah kondisi belum menguatnya kesadaran dalam berpolitik ditingkatkan masyarakat luas, maka momentum pilpres dan wapres menjadi pertarungan politik yang kian terbuka dan membuka ruang potensi manipulasi, konflik, politik uang dan intimidasi politik.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Distrik Jayapura Selatan propinsi Papua yang sebenarnya peluang melakukan pematangan dan penyadaran demokrasi, pada akhirnya hanya terhenti pada seberapa penting pimpinan harus dilahirkan, hal yang sangat berjauhan dengan bagaimana kesadaran politik itu akan terbangun. Masyarakat hanya melahirkan pimpinan bukan kepada bagaimana menguatkan sebuah sistem pemberian amanah dan melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan. Berbagai sikap pun muncul dengan sendirinya, baik yang mendorong orang untuk berpartisipasi atau tidak, karena mengingat daya pikir masyarakat yang belum kritis. Umumnya masyarakat memilih karena mereka merasa memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sebagian lagi karena belum terpuaskan dengan kondisi bangsa akibat konflik politik tidak puas dengan pemimpin yang lama, sehingga menimbulkan sikap apatis.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua pada 9 April tahun 2014 tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah. Terlihat dari total jumlah pemilih 82.765, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 40.630 suara, pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Distrik Jayapura Selatan, atau berjumlah 49%. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dan sekaligus memprihatinkan karena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat sangat signifikan. Maka dengan ini penulis ingin menjelaskan permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian lapangan tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Distrik Jayapura Selatan.

### **1. Sifat Apatisme Masyarakat**

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Jayapura Selatan, Menurut salah satu personil KPU, mengatakan bahwa:

*"Dari pemantauan kami sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden memang agak menurun, karena masyarakat bersifat apatis (kurang peduli) dan bersikap acuh tak acuh dengan pemilu kali ini. Tetapi banyak juga masyarakat yang semakin sadar dengan kewajibannya dalam konteks demokrasi, mereka sangat antusias datang memberikan hak suaranya".*

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh Masyarakat berinisial M.S. beliau mengatakan bahwa;

*"Pada Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, partisipasi politik masyarakat cukup tinggi antusias masyarakat dalam memberikan hak suaranya, Saya sempat memantau di beberapa TPS sejak pagi sudah banyak masyarakat yang antri di TPS masing-masing menunggu giliran untuk memberikan hak suaranya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada juga warga yang tidak memberikan hak suaranya alias golput".*

Dari hasil wawancara dengan informan yang terpilih, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2014 di Distrik Jayapura Selatan cukup mengecewangkan. Walaupun cukup berimbang namun dari segi presentasi sebenarnya penurunannya sangat signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya untuk menggunakan hak suaranya masih sangat rendah. Kecenderungan masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya atau Golput justru semakin meningkat.

### **2. Sosialisasi Politik**

Momentum politik Pilpres di Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua menunjukkan angka partisipasi yang rendah, yaitu 76,00% hal ini dapat dilihat partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak politiknya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terpilih.

Sebagaimana diungkapkan salah seorang Akademisi/Praktisi W. W, beliau mengatakan bahwa:

*“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat; seperti sosialisasi politik, dalam perkembangan politik umumnya sosialisai atau pembelajaran politik bagi warga negara secara umum belum dilaksanakan secara maksimal. Pendidikan politik masih lebih difokuskan pada mereka yang terlibat langsung dengan aktifitas intern partai politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku”.*

### **3. Distribusi Surat Suara**

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) N. W beliau menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, sebagai berikut:

*“Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di distrik Jayapura Selatan adalah masalah distribusi surat suara yang sering mengalami kendala keterlambatan, ada juga surat suara yang rusak, kemudian masalah pendistribusian surat suara. Faktor lain yang juga mempengaruhi ialah tidak tersalurnya seluruh undangan bagi pemilih. Inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi politik masyarakat pada akhirnya semakin menurun”.*

Dalam wawancara dengan salah seorang Masyarakat S. M beliau menjelaskan bahwa:

*“Sebagai warga negara yang baik tentu kami sangat antusias dengan pesta demokrasi dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden yang di selenggarakan oleh pemerintah, karena pemilihan presiden hanya dilakukan sekali dalam lima tahun. Namun ada masyarakat yang bersikap apatis dengan masalah ini, mereka tidak punya kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang seharusnya wajib menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada akhirnya mereka termasuk dalam golongan putih atau (Golput).*

S. M. Juga melanjutkan bahwa:

*“Sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi warga masyarakat masih sangat kurang atau malahan tidak ada sama sekali. Jadi menurut saya pemerintah harus menyediakan program khusus bagi bagi seluruh warga negara untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik lewat sosialisasi dan pendidikan politik.*

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan tentang informasi politik yang belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan masih banyak warga yang tidak mengetahui secara jelas ketentuan atau pun jadwal pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini komisi pemilihan umum.

Hasil penelitian lewat wawancara bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara teristimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisasi politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistem dan penerus sistem dimasa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Demikian pendapat-pendapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

#### **4. Peran Media Massa**

Media massa adalah salah satu sarana komunikasi yang dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh khalayak. Demikian juga dalam kancah politik betapa besar peran media massa dalam menunjang keberhasilan dan kesuksesan dalam pemilihan umum. Elemen dari sebuah tahapan yaitu disaat media massa menempatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Isi Pesan media dalam memberikan informasi secara luas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Rendahnya insensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan penyelenggaraan pemilu mendorong menurunnya informasi yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pemilihan umum.

Pesan mengenai pemilu yang dihadirkan oleh media harusnya memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mengkomunikasikan mengenai betapa pentingnya menghadirkan dan memilih seorang pemimpin dan melakukan pengawasan kebijakan terhadap pemimpin yang terpilih. Pesan dan gagasan seharusnya dikemas secara menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas untuk menimbulkan minat dan kehendak masyarakat untuk memilih, merupakan peran media untuk melakukan pendidikan politik, bukan hanya berkutat pada pesandan persepsi yang subjektif dan skeptis dalam melihat kepemimpinan negeri ini. Dengan pemahaman dan konstruksi bersama maka pesan yang disampaikan oleh media di Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua dapat mengkomunikasikan tujuannya. Pesan yang dihadirkan oleh media dalam mendorong tingkat partisipasi yang tinggi telah mencirikan karakteristik khalayak dan memiliki efek dalam melakukan agitasi. Hanya dengan cara demikian diharapkan suatu pesan, mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik dapat diterima oleh masyarakat umum.

Dalam hubungannya dengan peran media, maka dilakukan diwawancara dengan seorang Akademisi/Praktisi W.W, beliau menuturkan bahwa:

*“Peran media massa cukup berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mendapat informasi tentang proses penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden justru melalui media massa; baik lewat siaran televisi, radio maupun media cetak, bahkan lewat media sosial. Selama proses pemilu media massa sangat gencar memberitakan/menyiarkan perkembangan berita politik secara terus menerus. Bahkan media juga berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, sambil mempengaruhi, mengajak bahkan memotivasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden”.*

Intinya Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Tentunya peran positif yang dapat dimainkan oleh media massa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti pendidikan dan sosialisasi politik terhadap perkembangan yang ada sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang proses berlangsungnya pemilihan umum di Distrik Jayapura Selatan, dengan informasi yang didapat seharusnya masyarakat ikut aktif dan turut serta dalam politik yang ada.

Walaupun media massa telah berperan serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua, tetapi masih banyak warga yang belum memahami arti demokrasi secara utuh, sehingga sangat sulit dalam membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sangat penting adanya informasi secara mendalam bagi masyarakat tentang orientasi politik lewat sosialisasi politik dan pendidikan politik. Demikian pentingnya sosialisai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

## **5. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Keberhasilan Pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan itu adalah faktor kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena setiap program pemilihan yang diadakan, baik pemilihan umum pusat dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan pejabat daerah atau Pilkada, KPU menjadi menjadi salah satu lembaga pemilu yang mempunyai peranan penting didalam menjalankan mekanisme proses pemilihan umum tersebut.

Mulai dari penataan daftar pemilih tetap (DPT) sampai pada penghitungan suara dan penetapan pemenang pemilu kinerja KPU sangat padat dan rumit. Penataan daftar pemilih tetap yang baik sangat mendukung

berhasilnya partisipasi politik. Persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan pemilihan umum, karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi.

Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum. Kinerja KPU memang cukup rumit, apalagi bila daerah pemilihan sangat luas lokasinya yang mengakibatkan keterlambatan dalam pendataan pemilih tetap dan cukup memakan waktu dalam pendistribusian surat suara dan undangan yang harus disebarkan kepada semua masyarakat wajib pilih. Selain pendistribusian yang harus memakan waktu, mereka (KPU) juga harus mengatur jadwal kampanye progressif untuk mendorong masyarakat supaya menentukan pilihan politiknya dan ikut berpartisipasi didalam pemilihan umum. Walau kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih, yang mengutamakan kebutuhan individualnya daripada melakukan pencoblosan. Hal ini mempengaruhi keberhasilan elemen politik untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Lembaga Komisi pemilihan Umum (KPU) yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas diharapkan menghasilkan pemilu yang berkualitas, sistematis, legitimasi dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. KPUD, penyelenggara pemilihan di daerah, aparat pemerintah, peserta pemilihan, pengawas pemilihan dan semua pihak yang berperan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus bertindak jujur dan berwibawa sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat M. S, beliau mengatakan bahwa:

*"Proses penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden sangat ditunjang oleh kinerja KPUD yang sudah bekerja secara profesionalisme dalam mensukseskan Pemilu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. KPUD telah merealisasikan berbagai bentuk kampanye, baik lewat partai politik yang berkepentingan dalam membuat baliho, bosor, spanduk dan atribut-atribut serta simbol-simbol partai politik lainnya. Mereka KPUD sudah bekerja semaksimal mungkin didalam menunjang partisipasi politik masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaan pemilu kali ini terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya".*

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Jayapura Selatan sudah cukup profesional dalam bekerja mereka telah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi menentukan pilihan politiknya.

Sedangkan menurunnya antusiasme masyarakat dalam keikutsertaan dalam pesta demokrasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang kurang mendukung. Seperti jadwal kampanye yang sangat kurang menyebabkan masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, tingkat pendidikan politik masyarakat dan kualitas kesadaran bernegara yang belum tertanam dalam hati sanubari masyarakat. Dari apa yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa partisipasi politik distandarisasikan dalam pola

menurut sistim tertentu, karena partisipasi politik akan sangat bergantung pada sosialisasi politik dan pendidikan politik serta sistim politik tempat dimana partisipasi itu dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitain yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Papua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, sifat apatis dari masyarakat itu sendiri, sosialisasi politik, distribusi surat suara yang masih belum efektif, peran media masa dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, serta kinerja dari komisi pemilihan umum daerah yang masih belum maksimal menyebabkan terjadinya kelesuan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2. Media massa yang diharapkan sudah maksimal dalam menyiarkan orientasi-orientasi politik dengan gencar dan secara terus-menerus, ternyata belum mampu menggugah kesadaran bagi masyarakat dalam memberikan hak suaranya sebagai wujud nyata dalam memberikan partisipasi politik.
3. Kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sudah cukup maksimal dalam pemilu, Namun pada kenyataannya masyarakat belum semuanya terdorong untuk mensukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk kepentingan warga negara Indonesia secara umum. "Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di distrik Jayapura Selatan adalah masalah distribusi surat suara yang sering mengalami kendala keterlambatan, ada juga surat suara yang rusak, kemudian masalah pendistribusian surat suara. Faktor lain yang juga mempengaruhi ialah tidak tersalurkannya seluruh undangan bagi pemilih. Inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi politik masyarakat pada akhirnya semakin menurun".

### **B. Saran**

Melihat permasalahan yang sudah disimpulkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peran dari pemerintah daerah dan partai politik dalam memberikan sosialisasi tentang pemilihan umum, serta pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya arti sebuah suara dalam pemilihan umum.
2. Diperlukan strategi sosialisasi dari media masa dalam memberikan sosialisasi politik, melalui bentuk-bentuk pesan/penyampaian yang menarik dan mudah dimengerti, agar masyarakat dapat tergerak

- memberikan hak suaranya dengan kesadaran dari diri sendiri, karena mengerti mengenai pentingnya berdemokrasi.
3. Diharapkan kepedulian pemerintah, dalam memperbaiki sistim politik. Perlu adanya kampanye politik secara periodik, melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi seluruh warga negara, agar semakin kuat nya ideologi politik dipahami oleh masyarakat, rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik semakin ditingkatkan dengan melibatkan elemen-elemen yang mampu memberikan ideologi politik demi mewujudkan kondisi perpolitikan yang sehat dan demokrasi yang sebenar-benarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura 2013, Statistik Kecamatan Jayapura Selatan 2015.
- Budiharjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 1999.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third of democratization In The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Jhon Haris, dkk. 2005. *Politisasi Demokrasi*. Jakarta: Demos.
- Joseph Scumpeter. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper.
- Kuskridho Ambardi. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Labolo, Muhadam, Dr. Dan Teguh Ilham, S.Stp. 2015. *Partai Politik Dan Sistim Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Milbrath, 2009 hal.105-106 *partisipasi politik*, Jakarta: Kepustakaan
- Mochtar Mas'oed. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy dalam Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nimmo, Dan. *Political Communication and Public Opinion in America*. (Terjemahan: Komunikasi Politik dicetak oleh: Remaja Karya Offset, 1989, Bandung).
- Purnama Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis terhadap Sistim Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Malang: Nusa Media
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarno, A.P. 2004, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Universitas terbuka.